

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut Abuddin Nata (2003: 62) bahwa secara yuridis, pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang secara langsung maupun tidak langsung, dapat dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan Islam di lembaga-lembaga pendidikan formal. Adapun dasar yuridis pelaksanaan pendidikan tersebut yaitu:

*Dasar ideal* yakni pancasila sebagai falsafah negara; dengan sila pertamanya; Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia memiliki kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk merealisasikan hal tersebut maka diperlukan pendidikan agama, karena tanpa pelaksanaan pendidikan tersebut ketakwaan kepada Tuhan sulit terwujud.

Di samping itu *dasar operasional* pendidikan Islam di Indonesia adalah UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2, berbunyi: *Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya.* Oleh karenanya pendidikan agama merupakan hal yang penting untuk diselenggarakan dalam rangka melaksanakan ibadah dan kewajiban agama lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, Bab II Pasal 3 bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Dalam operasionalnya Pendidikan Agama Islam atau PAI sebagai mata pelajaran di sekolah-sekolah umum diatur oleh Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan Nasional. Di sekolah-sekolah umum negeri sejak dari pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, Pendidikan Agama Islam dilaksanakan dua jam pelajaran setiap minggunya.

Menurut Haidar Putra Daulay (2004: 38-41) ada beberapa problem PAI di sekolah umum negeri, yaitu: *Pertama*, peserta didik berasal dari lingkungan keluarga yang beraneka ragam tingkat pemahaman, pengamalan, dan penghayatan agamanya. *Kedua*, pendidikan itu setidaknya memiliki tiga aspek sasaran, yaitu: 1) sasaran pengisian otak (*transfer of knowledge*). Di sini yang paling ditekankan adalah mengisi kognitif peserta didik, mulai dari yang sederhana seperti menghafal sampai analisis. 2) mengisi hati, melahirkan sikap positif (*transfer of value*), sasarannya menumbuhkan kecintaan kepada kebaikan dan membenci kejahatan. 3) perbuatan (*transfer of activity*), timbul keinginan untuk melakukan yang baik dan menjauhi perilaku buruk. Di antara

ketiga tersebut yang paling mudah dilakukan oleh seorang guru adalah pendekatan kognitif.

*Ketiga*, ada kesan di berbagai sekolah umum negeri bahwa pendidikan agama tertumpu menjadi tanggung jawab guru PAI saja, sedangkan guru-guru mata pelajaran lainnya merasa kurang ada hubungannya dengan pendidikan agama. Menurut Jasa Ungguh Muliawan (2005: xii) bahwa pendidikan Islam integratif dan interkoneksi berupaya memadukan dua hal yang sampai saat ini masih diperlakukan secara dikotomik, yakni mengharmoniskan kembali relasi antara Tuhan-alam dan wahyu-akal, dimana perlakuan secara dikotomik terhadap keduanya telah mengakibatkan keterpisahan pengetahuan agama dengan pengetahuan umum.

*Keempat*, PAI sebagaimana pendidikan lainnya juga membutuhkan sarana dan fasilitas. Sekolah juga membutuhkan laboratorium agama selain masjid. Laboratorium itu dilengkapi dengan sarana dan fasilitas yang membawa peserta didik untuk lebih menghayati agama, misalnya video religius, musik/nyanyian religius, syair/puisi religius, foto-foto religius, alat-alat peraga PAI, dan lain sebagainya yang merangsang emosional keagamaan peserta didik.

*Kelima*, evaluasi yang berorientasi terhadap penilaian kognitif semata sudah harus diubah kepada evaluasi yang berorientasi kepada penilaian afektif dan psikomotorik. Di samping tetap melaksanakan penilaian kognitif, sangat perlu dilakukan bentuk evaluasi dengan mempergunakan pendekatan afektif dan psikomotorik, misalnya skala sikap dan penilaian praktek ibadah.

Seiring dengan persoalan di atas, Depag Propinsi Jawa Tengah melalui Surat Nomor Wk/5.a/PP.02.1/3180/2000 yang ditandatangani oleh Djamhuri M. Nur Rasjid selaku Kabid Bin Penda Islam meminta bantuan kepada Kakandepag Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah untuk menetapkan sekolah umum di daerah masing-masing sebagai Sekolah Model PAI dengan salah satu ketentuannya yaitu: sekolah umum tersebut berstatus negeri yang terdiri dari satu SD di tiap Pembantu Bupati/Walikota dan satu SLTP beserta satu SLTA di tiap Kabupaten/Kota.

Menindaklanjuti hal itu, M. Muhadi Syuhada selaku Kakandepag Kota Pekalongan melalui Surat Keputusannya Nomor Mk.12/5.a/PP.00/869/2000 menunjuk beberapa sekolah umum negeri menjadi sekolah model PAI. Surat tersebut pun melahirkan Surat Keputusan Walikota Pekalongan (Samsudiat) Nomor 451.4/475 Tahun 2002 tentang Penetapan Sekolah Umum Negeri Model PAI yang tentu saja semakin menguatkan keberadaan sekolah umum negeri model PAI di Kota Pekalongan.

Tahun 2005, Achmad Suyuti selaku Kakandepag Kota Pekalongan yang baru pada waktu itu menerbitkan Surat Nomor Kd.11.34/4/PP.00.11/907/2005 juga tentang sekolah umum negeri model PAI. Sehingga Walikota Pekalongan (Mohamad Basyir Ahmad) menerbitkan Surat Keputusan Nomor 420/1006 Tahun 2005 tentang Penetapan Sekolah Umum Negeri Model PAI. Saat itu Walikota menetapkan 21 sekolah umum negeri model PAI yang terdiri dari SD, SLTP, dan SLTA dalam rangka

menyelaraskan visi-misinya mewujudkan masyarakat Kota Pekalongan yang religius, dengan cepat, tepat, sistematis dan berhasil.

Komitmennya mengupayakan terwujudnya masyarakat Kota Pekalongan yang religius, dengan cepat, tepat, sistematis dan berhasil dengan dimulai dari lingkungan sekolah, maka Walikota Pekalongan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 420/456 Tahun 2008 tentang Penetapan Sekolah/Madrasah Model PAI yang saat itu menetapkan 34 sekolah/madrasah lagi, terdiri dari sekolah dan madrasah, baik yang negeri maupun swasta.

Sekolah yang diusulkan sebagai sekolah model PAI yaitu sekolah yang telah memenuhi syarat atau mendekati hal-hal: 1) Kepala sekolah mempunyai kepedulian dan perhatian yang tinggi terhadap pelaksanaan pembinaan PAI, 2) Guru PAI sekolah mempunyai kreatifitas yang menunjang pelaksanaan PAI, 3) Guru-guru lainnya dalam menyampaikan materi pelajaran mengaitkan dengan PAI, 4) Suasana dalam sekolah nuansa Islamnya menonjol, 5) Sarana-prasarana pendukung pelaksanaan PAI tercukupi, seperti: masjid/mushalla, peralatan ibadah, dan buku/majalah/referensi Islam, 6) Lingkungan dan masyarakat di sekitar sekolah mendukung PAI, 7) Peran Komite Sekolah dalam pembinaan PAI menonjol, 8) Kegiatan intra dan ekstra kurikuler di sekolah mendukung keberhasilan pengembangan PAI, seperti: BTQ, pesantren kilat, peningkatan iman dan takwa di bulan Ramadhan, 9) Adanya koordinasi yang baik di bidang PAI antara sekolah dengan instansi terkait dan lembaga-lembaga keagamaan (Lampiran II Keputusan Walikota Pekalongan No. 420/456 Tahun 2008).

Indikator dari sekolah model PAI yaitu: 1) Membaca al-Qur'an 5-10 menit sebelum jam pelajaran pertama, 2) Berdoa dengan bahasa Arab di awal dan di akhir pelajaran, 3) Melaksanakan shalat dzuhur berjamaah, 4) Memakai jilbab bagi yang putri dan celana panjang bagi yang putra, 5) Membiasakan berinfak, 6) Membiasakan salam secara Islami dan berakhlakul karimah, 7) Mengadakan pengajian rutin, 8) Mengadakan kegiatan sosial keagamaan, 9) Mengadakan pembelajaran BTQ, 10) Memaksimalkan pemeliharaan dan pemanfaatan mushalla/masjid, 11) Menggiatkan budaya/seni Islam (rebana, kaligrafi, musik/lagu religi), 12) Membaca doa (al-Fatihah/doa lain) pada saat mengheningkan cipta dalam upacara bendera, 13) Mengadakan PHBI dengan ceramah, lomba, kegiatan sosial, dll. 14) Memasyarakatkan penanggalan Hijriyah, 15) Mengadakan kegiatan Ramadhan dengan pesantren kilat, tadarus al-Qur'an, dan tarawih, 16) Menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, indah, dan sehat, 17) Pengadaan alat-alat ibadah (mukena, sarung, al-Qur'an), 18) Mengintegrasikan iman dan takwa dalam setiap KBM (Lampiran II Keputusan Walikota Pekalongan No. 420/456 Tahun 2008).

Dalam pelaksanaannya, masing-masing sekolah berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Menurut Masrukhin selaku Kasi Mapenda Islam Depag Kota Pekalongan bahwa masing-masing sekolah memiliki kendala yang berbeda pula. Namun demikian, survei yang telah peneliti lakukan di SDN Panjang Wetan 02 Kota Pekalongan sebagai sekolah model PAI, membuat peneliti merasa ingin menindaklanjuti survei tersebut, kemudian meneliti proses pembelajaran yang ada di situ. SD tersebut menarik untuk

dicermati karena sebagai sekolah umum negeri, namun para guru dan siswanya berpakaian seragam secara *syar'i* (menutup aurat), mengawali aktifitas pembelajaran dengan membaca al-Qur'an/BTQ, membaca doa *wirdu ash-shabaah* sebelum jam pelajaran pertama, melatih shalat dluha, lingkungannya rapi dan bersih, membiasakan shalat dzuhur berjamaah, menyelenggarakan Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ) setelah jam pelajaran terakhir. Proses pembelajaran seperti itu di SD umum negeri merupakan hal yang langka.

Bertolak dari itu, maka dilakukan penelitian *Pelaksanaan SK Walikota Pekalongan tentang Sekolah Umum Negeri Model Pendidikan Agama Islam (Studi di SDN Panjang Wetan 02 Kota Pekalongan)* guna pengembangan keilmuan akademis sekaligus berupaya memberi masukan kepada pembuat kebijakan dan praktisi sekolah model PAI di Kota Pekalongan.

## **B. Permasalahan**

Dari uraian di atas dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa Walikota Pekalongan menetapkan kebijakan sekolah umum negeri model Pendidikan Agama Islam?
2. Bagaimana proses pembelajaran di SDN Panjang Wetan 02 Kota Pekalongan sebagai sekolah umum negeri model Pendidikan Agama Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menemukan alasan Walikota Pekalongan menetapkan kebijakan sekolah umum negeri model Pendidikan Agama Islam.
2. Untuk mendeskripsikan proses pembelajaran di SDN Panjang Wetan 02 Kota Pekalongan sebagai sekolah umum negeri model Pendidikan Agama Islam.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis untuk menambah khasanah keilmuan akademis, terutama tentang sekolah umum negeri model Pendidikan Agama Islam.
2. Secara praktis sebagai masukan untuk pembuat kebijakan dan praktisi sekolah umum negeri model Pendidikan Agama Islam di SDN Panjang Wetan 02 Kota Pekalongan.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Muchtar Hadi (2001) dalam tesisnya yang berjudul *Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Umum Negeri (Tinjauan Peraturan Perundang-undangan Tahun 1945 Sampai 2000)*, menyampaikan bahwa berbagai upaya serius untuk pendidikan, termasuk Pendidikan Agama Islam yang diselenggarakan di sekolah umum negeri itu berada dalam koridor peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan diperlukan, mengingat

keberlangsungan Pendidikan Agama Islam pada sekolah umum negeri menjadi salah satu bagian dari usaha pemerintah.

Dengan demikian berarti peraturan perundang-undangan itu turut menentukan jalan dan bahkan warna pendidikan yang ada. Peraturan perundang-undangan pendidikan menjadi sesuatu yang diperebutkan secara politis. Dan ternyata telah menjadi kenyataan dalam rentang waktu sekitar tahun 1945 sampai 2000 sebagaimana yang telah diteliti dan dianalisis oleh Muchtar Hadi dalam tesisnya.

Dalam tesisnya, Muchtar Hadi menemukan kesenjangan pelaksanaan Pendidikan Agama Islam dan pengembangan pembelajaran. Menurutnya, alokasi waktu penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam 2 jam pelajaran setiap minggu dirasa kurang, mengingat tujuan yang akan dicapai sangat kompleks disamping harapan masyarakat terhadap keberhasilan pendidikan agama terlalu tinggi. Penelitian Muchtar Hadi telah mengungkapkan bahwa Pendidikan Agama Islam yang diselenggarakan di sekolah umum negeri, termasuk di SDN itu berada dalam koridor peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan menentukan jalan dan bahkan warna pendidikan.

Kekurangan dari apa yang dikaji Muchtar Hadi dalam tesisnya yaitu tidak menjelaskan materi-materi pokok Pendidikan Agama Islam yang harus diberikan pada setiap tingkatan/jenjang sekolah. Ketika di tingkatan SD belum waktunya diberi materi seperti haji, sewa-menyewa, wakaf, zakat maal, dan lain-lain, maka persoalan minimnya Pendidikan Agama Islam bukan hanya 2

jam pelajaran setiap minggu, tetapi juga perlunya pengembangan pembelajaran PAI di SD umum negeri. Selain itu, tesis Muchtar Hadi belum sampai menyentuh pada signifikansi dan strategisnya kebijakan Kepala Daerah terhadap Pendidikan Agama Islam di sekolah umum negeri, terutama di SDN.

Muslam (2002) dalam tesisnya yang berjudul *Implementasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam (Studi Kasus Sekolah Dasar Islam Sultan Agung 1 Semarang)*, menyampaikan bahwa dalam kaitannya dengan kurikulum Pendidikan Agama Islam, hal yang perlu diperhatikan: bahan atau isi pengajaran harus meliputi tujuh unsur pokok, yaitu: keimanan, ibadah, akhlak, muamalah, syari'ah, dan tarikh. Semestinya, materi-materi tersebut tidak sekedar tercantum rapi dalam kurikulum, tetapi juga harus dapat diimplementasikan.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi kurikulum Pendidikan Agama Islam secara garis besar ada dua yaitu: *Pertama* faktor internal, meliputi kurangnya sarana dan prasarana, jumlah murid dalam kelas yang terlalu banyak sehingga tidak ideal, dan guru mengajar tidak variatif sehingga menjenuhkan. *Kedua* faktor eksternal, meliputi kurangnya perhatian orang tua sehingga berdampak pada peserta didik dan lingkungan sekolah yang berada di tengah keramaian kota.

Menurut Muslam pula bahwa pelaksanaan evaluasi atau penilaian semestinya bertujuan dan berfungsi sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan dari suatu proses kegiatan belajar anak, mulai dari input sampai

outputnya, baik melalui tes formatif maupun tes sumatif. Dalam pelaksanaannya, ditemukan oleh Muslim bahwa evaluasi terjebak pada hal-hal yang bersifat teoritis, lebih menekankan aspek kognitif, sedangkan aspek psikomotorik dan afektif kurang diperhatikan. Selain itu, Muslim mengungkapkan bahwa Pendidikan Agama Islam tidak hanya sebatas dalam kurikulum saja, tetapi juga mesti berlanjut pada implementasi kurikulum tersebut.

Kekurangan dari tesis Muslim, yakni tidak mengkajinya dari perspektif manajemen pendidikan. Padahal untuk mengetahui kendala dan sebab kurikulum yang tidak implementatif, bisa lebih mudah dari sudut pandang ilmu manajemen. Sehingga bisa diketahui pengelolaan mana yang baik dan pengelolaan mana yang buruk terkait dengan implementasi kurikulum. Begitu pula tentang evaluasi, sampai terjebak pada hal-hal yang bersifat teoritis dan lebih menekankan aspek kognitif itu juga karena adanya manajemen yang tidak baik.

Oleh karena itu, posisi penelitian ini adalah melanjutkan kajian tesis Muchtar Hadi terkait dengan Pendidikan Agama Islam di sekolah umum negeri. Kajian sekolah umum negeri tersebut akan dikaitkan dengan sekolah Model PAI. Selain itu, posisi penelitian ini merupakan pengembangan dari kajian tesis Muslim terkait dengan implementasi kurikulum Pendidikan Agama Islam di sebuah sekolah dasar. Maka penelitian ini fokus pada kajian *Pelaksanaan SK Walikota Pekalongan tentang Sekolah Umum Negeri Model Pendidikan Agama Islam (Studi di SDN Panjang Wetan 02 Kota Pekalongan)*.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Desain Penelitian

#### a. Pendekatan Penelitian

Penulisan yang dilakukan dalam tesis ini menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif. Yaitu penelitian yang datanya dinyatakan secara verbal dan kualifikasinya bersifat teoritis. Data tidak diolah melalui perhitungan matematis dengan berbagai rumus statistika, tetapi diolah secara rasional dengan menggunakan pola berpikir tertentu (Nawawi, 1998: 327).

#### b. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dipakai oleh penulis adalah *description research*, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan apa yang ada (John W. Best, 1982: 119). Dan dalam penelitian ini hal yang akan diungkap yaitu deskripsi proses pembelajaran di SDN Panjang Wetan 02 Kota Pekalongan sebagai sekolah umum negeri model Pendidikan Agama Islam.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan Sumber Primer dan Sumber Sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dalam hal ini yaitu: Walikota Pekalongan, Kasi Mapenda Islam Depag Kota Pekalongan, Kabid PAUD SD dan Dikmas Dindikpora Kota Pekalongan, Kepala SDN Panjang Wetan 02 Kota Pekalongan, dan Guru

PAI SDN Panjang Wetan 02 Kota Pekalongan. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2006: 193), dalam hal ini yaitu: Surat Keputusan Walikota Pekalongan No. 420/1006 Tahun 2005, Surat Keputusan Walikota Pekalongan No. 420/456 Tahun 2008, petunjuk pelaksanaan sekolah model PAI Kota Pekalongan, program kegiatan sekolah model PAI di SDN Panjang Wetan 02 Kota Pekalongan, dan buku-buku lain yang terkait dengan PAI.

Dalam upaya mendapatkan data yang sesuai dengan keperluan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi (*Observation*)

Menurut Riyanto (2001: 96) bahwa observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian. Metode observasi mampu membantu terlaksananya kegiatan penelitian dengan baik. Metode observasi digunakan peneliti untuk memperoleh data tentang proses pembelajaran di SDN Panjang Wetan 02 Kota Pekalongan yang merupakan sekolah umum negeri model PAI.

Adapun yang diobservasi yaitu: guru dan siswa yang berpakaian *syar'i* (menutup aurat), tadarus al-Qur'an/Qiro'ati, pembacaan doa *wirdu ash-shabaah*, penyampaian materi-materi

pelajaran dikaitkan dengan nilai-nilai aqidah-akhlaq, pembiasaan shalat dluha, pembiasaan shalat dzuhur berjamaah, pembiasaan berinfaq, pembiasaan mengucapkan salam dan berjabat tangan, keadaan lingkungan sekolah, dan keteladan guru.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan jalan tanya-jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan kepada tujuan penelitian (Marzuki, 2000: 62). Sedangkan menurut Mardalis (1993: 64), wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.

Dalam penelitian ini, mereka yang akan diwawancarai peneliti adalah Walikota Pekalongan, Kasi Mapenda Islam Depag Kota Pekalongan, dan Kabid PAUD SD & Dikmas Dindikpora Kota Pekalongan. Wawancara tersebut diharapkan dapat menggali alasan-alasan pemerintah Kota Pekalongan menetapkan kebijakan sekolah umum negeri model PAI. Sehingga akan diperoleh data tentang *alasan ideal*, *alasan konstitusional*, *alasan struktural*, dan *alasan kultural* pemerintah, terutama Walikota Pekalongan menetapkan sekolah umum negeri model PAI.

### c. Dokumentasi

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat selain diperoleh dari sumber manusia juga diperoleh dari dokumen. Dokumentasi ini dapat berupa catatan-catatan, buku, majalah, surat, petunjuk pelaksanaan, pedoman kegiatan pembelajaran, dan foto kegiatan. Studi dokumen merupakan pelengkap dari metode observasi dan metode wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen sebagai data historis.

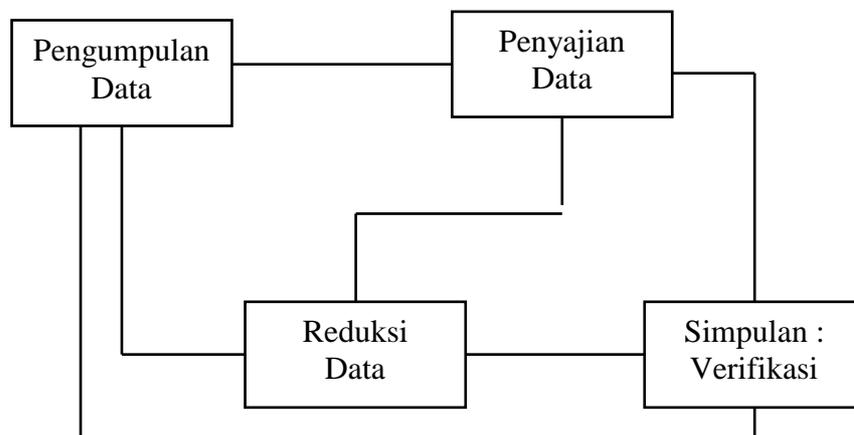
Metode ini digunakan untuk menjawab seperti halnya tentang adanya surat resmi dari Depag Propinsi Jateng, surat resmi dari Depag Kota Pekalongan, Surat Keputusan Walikota Pekalongan tentang Penetapan Sekolah Umum Negeri Model PAI, petunjuk pelaksanaan sekolah model PAI, pedoman kegiatan pembelajaran sekolah model PAI, dan foto-foto kegiatan sekolah model PAI sebagai landasan ketentuan sekolah model PAI.

### 3. Teknik Analisis Data

Data yang sudah berhasil dihimpun kemudian ditabulasi dan selanjutnya dianalisis. Moleong mengemukakan bahwa analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy J. Moleong, 1990: 126).

Penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif, yakni berusaha untuk menggambarkan apa yang ada. Penelitian deskriptif menyangkut peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi dan berhubungan dengan kondisi masa kini. Ia bisa mengenai kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, akibat atau efek yang sedang terjadi, atau kecenderungan yang sedang berkembang (John W. Best, 1982: 119).

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Dipilihnya teknik analisis ini karena permasalahan dan sasaran penelitian ini adalah mencari alasan Walikota Pekalongan menetapkan sekolah umum negeri model PAI dan mencari deskripsi proses pembelajaran di SDN Panjang Wetan 02 Pekalongan sebagai sekolah model PAI. Menurut Burhan Bungin (2007: 144) bahwa analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Di antaranya adalah melalui tiga tahap model air, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Namun, ketiga tahapan tersebut berlangsung secara simultan. Analisis data ini digambarkan Miles *and* Huberman sebagaimana dikutip Burhan Bungin (2007: 145) sebagai berikut:



## G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari enam bab. Setiap bab merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bab lainnya, dimana masing-masing bab saling berkaitan. Secara kronologis akan disajikan dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan sebagai pengantar bab-bab berikutnya yang mencakup beberapa sub bab, yaitu: latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika.

Bab II merupakan landasan teori yang mencakup beberapa sub bab. Sub bab *pertama* tentang manajemen, terdiri dari pengertian manajemen, tujuan manajemen, teori manajemen, dan prinsip-prinsip manajemen. Sub bab *kedua* tentang pendidikan, terdiri dari pengertian pendidikan, tujuan pendidikan, pendidikan sebagai suatu sistem, dan Pendidikan Agama Islam.

Bab III merupakan gambaran umum SDN Panjang Wetan 02 Kota Pekalongan yang mencakup beberapa sub bab yaitu: identitas sekolah, tujuan sekolah, visi dan misi, motto sekolah, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, prestasi sekolah, dan sebagai sekolah Model PAI..

Bab IV merupakan paparan alasan pemerintah Kota Pekalongan menetapkan kebijakan sekolah umum negeri model Pendidikan Agama Islam yang mencakup beberapa sub bab. Sub bab *pertama* alasan ideal, terdiri dari alasan ideal Walikota Pekalongan, alasan ideal Kasi Mapenda Islam Depag Kota Pekalongan, dan alasan ideal Kabid PAUD SD & Dikmas Dindikpora

Kota Pekalongan. Sub bab *kedua* alasan konstitusional, terdiri dari alasan konstitusional Walikota Pekalongan, alasan konstitusional Kasi Mapenda Islam Depag Kota Pekalongan, dan alasan konstitusional Kabid PAUD SD & Dikmas Dindikpora Kota Pekalongan. Sub bab *ketiga* alasan struktural, terdiri dari alasan struktural Walikota Pekalongan, alasan struktural Kasi Mapenda Islam Depag Kota Pekalongan, dan alasan struktural Kabid PAUD SD & Dikmas Dindikpora Kota Pekalongan. Sub bab *keempat* alasan kultural, terdiri dari alasan kultural Walikota Pekalongan, alasan kultural Kasi Mapenda Islam Depag Kota Pekalongan, dan alasan kultural Kabid PAUD SD & Dikmas Dindikpora Kota Pekalongan.

Bab V merupakan deskripsi proses pembelajaran di SDN Panjang Wetan 02 Kota Pekalongan sebagai sekolah umum negeri model Pendidikan Agama Islam yang mencakup beberapa sub bab. Sub bab *pertama* kegiatan pembelajaran ke-1 yang terdiri dari membaca al-Qur'an atau jilid Qiro'ati dan membaca doa *wirdu ash-shabaah*. Sub bab *kedua* kegiatan pembelajaran ke-2 yang terdiri dari penyampaian pelajaran-pelajaran yang integratif dengan nilai-nilai aqidah-akhlaq dan shalat dluha. Sub bab *ketiga* kegiatan pembelajaran ke-3 yaitu shalat zuhur berjamaah. Sub bab *keempat* pembelajaran ke-4 yaitu pembelajaran di Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ) sekolah..

Bab VI yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan atau jawaban permasalahan yang telah dirumuskan dan saran-saran.